



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUHERMAN**
2. Jabatan : **KEPALA SUBAUDITORAT**
3. NHK : **93978**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.405.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2530 m2/63 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
3. Tanah Seluas 548 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000.000</b>
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MPV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOTOR, VESPA SPRINT 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.800.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.000.936</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.658.800.936</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.658.800.936</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.